

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT MANDIRI



**NETRALITAS BIROKRASI (ASN, KEPALA DESA BESERTA
PERANGKAT DESA) DI KECAMATAN BOTUPINGGE DAN
KECAMATAN SUWAWA SELATAN**

OLEH

Ketua Tim

Dr. LUCYANE DJAAFAR, SH, M.Pa

NIP. 196811062000032001

Anggota 1

Dr. RAMLI MAHMUD, S.Pd.,M.A

NIP. 198205032015041002

Anggota 2

Prof. Dr. SASTRO M. WANTU, SH, M.Si

NIP. 196609031996031001

**JURUSAN ILMU HUKUM DAN KEMASYARAKATAN
PROGRAM STUDI PPKn
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN MANDIRI 2024**

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Judul Kegiatan | : | NETRALITAS BIROKRASI (ASN, KEPALA DESA BESERTA PERANGKAT DESA) DI KECAMATAN BOTUPINGGE DAN KECAMATAN SUWAWA SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO |
| 2. Lokasi | : | Kabupaten Bone Bolango |
| 3. Ketua Tim Pelaksana | : | |
| a. Nama | : | Dr. Lucyane Djaafar, S.H., M.Pa |
| b. NIP | : | 19681106200032001 |
| c. Jabatan/Golongan | : | Lektor Kepala / 4 b |
| d. Program Studi/Jurusan | : | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| e. Bidang Keahlian | : | |
| f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail | : | 085256062220 |
| g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail | : | - |
| 4. Anggota Tim Pelaksana | : | |
| a. Jumlah Anggota | : | 2 orang |
| b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian | : | Dr. Ramil Mahmud, S.Pd., MA / |
| c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian | : | Prof. Dr. Sastro Mustapa Wantu, S.H.,M.Si / |
| d. Mahasiswa yang terlibat | : | - |
| 5. Lembaga/Institusi Mitra | : | |
| a. Nama Lembaga / Mitra | : | BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO |
| b. Penanggung Jawab | : | - |
| c. Alamat/Telp./Fax/Surel | : | - |
| d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) | : | - |
| e. Bidang Kerja/Usaha | : | - |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 6 bulan |
| 7. Sumber Dana | : | Biaya Sendiri |
| 8. Total Biaya | : | Rp. 2.500.000,- |



Gorontalo, 8 November 2024
Ketua

(Dr. Lucyane Djaafar, S.H., M.Pa)
NIP. 19681106200032001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN	v
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Potensi Wilayah	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya	2
1.3 Teknologi/Metode yang Digunakan	3
1.4 Profil Singkat Kelompok Mitra	3
1.5 Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya	4
BAB II.....	5
TARGET DAN LUARAN.....	5
BAB III	6
METODE PELAKSANAAN.....	6
2.1 Persiapan	6
2.2 Pelaksanaan	6
2.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	6
2.4 Kelayakan Perguruan Tinggi.....	6
BAB IV	7
JADWAL DAN BIAYA KEGIATAN	7
4.1 Anggaran Biaya.....	7
4.2 Jadwal Kegiatan.....	7
4.3 Tempat Kegiatan	7
BAB V.....	8
HASIL YANG TELAH DICAPAI	8
BAB VI	12
RENCANA TAHAP SELANJUTNYA.....	12
BAB VIII.....	13
PENUTUP.....	13

5.1 Kesimpulan.....	13
5.2 Saran.....	13
5.3 Ucapan Terima Kasih.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14
Biodata Ketua Pengusul	15

RINGKASAN

Netralitas Birokrasi selalu menjadi momok dalam setiap perhelatan demokrasi baik Pemilu maupun Pemilukada. Melalui Pemilu serentak tahun 2024, berbagai formulasi baik dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) Pusat maupun daerah untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada birokrasi agar tetap menjaga netralitas dan Pemilu. Upaya tersebut belum membawa hasil yang maksimal karena birokrasi selalu dijadikan mesin untuk memobilisasi dukungan perolehan suara. faktor persaudaraan, motif karir tim sukses, atasan, Pasangan Calon serta posisi Kepala Daerah sebagai PPK menyebabkan ASN Sulit bersikap Netral. Berangkat dari hal tersebut, Pengabdian ini bertujuan 1) Identifikasi masalah kerawanan pelanggaran Pemilu oleh birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta perangkat desa, 2) Membangun kesadaran birokrasi untuk tidak terlibat dalam politik praktis, 3) Memberikan Pendidikan politik sebagai penguatan preferensi politik birokrasi menjadi pemilih cerdas dengan mengedepankan independensi dan netralitas birokrasi menjelang Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango.

Kata Kunci : Netralitas, Birokrasi, Pemilu Serentak 2024

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Potensi Wilayah

Netralitas ASN dan perangkat desa merupakan permasalahan serius dalam setiap kompetisi baik Pemilu maupun Pemilukada. Sementara itu, regulasi atas keberadaan ASN, kepala desa dan perangkatnya secara tegas dilarang dalam melakukan politik praktis. Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Hal yang sama juga ditekankan dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam pasal 70 secara teknis tentang larangan pasangan calon dalam melibatkan ASN disetiap kampanye politik. Selain itu pasal 71 secara eksplisit menekankan pejabat negara, pejabat ASN, kepala desa/lurah dilarang membuat Keputusan atau Tindakan yang merugikan calon selama masa kampanye. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam pasal 29 UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa yang melarang dengan tegas kepala desa terlibat dalam politik praktis

(Kompas, 2021) menyebutkan bahwa berdasarkan temuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terdapat Factor penyebab netralitas ASN terdiri dari ikatan persaudaraan (50,76 %) dan motif karir (49,72%). Sementara itu faktor yang mempengaruhi antara lain tim sukses (32 %), atasan (28%) serta Pasangan Calon (24 %). 62,7 % Posisi Kepala Daerah sebagai PPK menyebabkan ASN Sulit bersikap Netral. Atas hal tersebut, data KASN menunjukkan bahwa terdapat 51,16 % Aspirasi ASN dicabut hak politik mereka sebagai pemilih. Temuan Kompas tersebut searah dengan teman (Edward Aspinall, 2019) bahwa terdapat 80 % penunjukan jabatan senior adalah hasil dukungan kepada calon selama kampanye Pemilu. 90 % kesetiaan jauh lebih penting dari kapasitas dan profesionalitas birokrasi. 60 % pejabat senior berpartisipasi dalam kampanye pemilu. 50 % ASN senior terlibat dalam kampanye politik di Jawa. Sementara diluar Jawa 100%

Data kuantitatif tersebut di atas juga searah dengan berbagai temuan tentang netralitas ASN dalam Pemilu maupun Pilkada diantaranya (Mahmud, et al., 2022) mengemukakan bahwa perilaku birokrasi dalam Pemilu cenderung dalam pendekatan perilaku sosiologis dan identifikasi partai, factor kepala daerah menjadi pertimbangan utama ASN dan perangkat desa dalam mendukung calon tertentu. Temuan Jahan (2006) dalam (Sarker, et al., 2017) mensinyalir bahwa politisasi birokrasi bukan hanya terjadi pada tataran eksekutif namun terjadi dalam struktur birokrasi yang berada dalam jajaran eksekutif seperti kepolisian.

Hal yang sama dikemukakan oleh (Gehlbach & Simpser, 2015) bahwa perilaku kepatuhan birokrasi seringkali penting untuk kelangsungan hidup politik, namun memunculkan kepatuhan dalam lingkungan yang dilembagakan secara lemah mengharuskan pelaku politik meyakinkan agen bahwa kekuasaan mereka pada kekuasaan aman, dengan memanipulasi kekuasaan dapat mendorong seorang birokrat untuk bekerja atas nama penguasa. Hal menarik lainnya adalah temuan (Adi, et al., 2021) mensiyalir bahwa dalam setiap perodesasi Pemilu, birokrasi selalu dikultuskan dengan ketidaknetralannya hingga saat ini belum dapat terselesaikan Atas dasar inilah (Porter & Rogowski, 2018) mengemukakan bahwa bias atas partisan yang tidak netral dalam pemilu harus dicermati lebih lanjut untuk melihat mengapa kelompok partisan ASN berpihak kepada calon dan partai tertentu dalam setiap Pemilu.

(Wahyudi, 2018) menyimpulkan bahwa perilaku ketidaknetralan birokrasi di Indonesia sudah terjadi sejak pra kemerdekaan hingga decade sekarang ini. Studi kontomprer keterlibatan birokrasi dalam pemilu dapat dilacak melalui fenomena kemenangan partai politik pada level Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. Temuan tersebut tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh (Siti, 2021) bahwa birokrasi Indonesia masih rentan terhadap intruksi politik kekuasaan untuk melanggengkan status quo dalam Pemilu maupun Pilkada. Menonjolnya keterlibatan birokrasi seiring dengan keikutsertaan petahana dalam pemilihan umum nasional dan daerah. ASN mengalami disorientasi dan budaya birokrasi yang masih mempertahankan nilai lama membuat birokrasi tidak efektif dalam mempertahankan profesionalisme dan kenetralan dalam Pemilu.

Merujuk pada apa yang telah dikemukakan di atas, pengabdian ini lebih fokus pada praktek *Electoral Observation*, dimana penyelenggara dalam hal ini perguruan tinggi dan Bawaslu Kabupaten Boane Bolango mengumpulkan informasi serta kesimpulan dan penilaian atas preferensi politik ASN dan perangkat Desa menjelang Pemilu serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini cukup beralasan, temuan (Irawan, 2011) bahwa pengawasan partisipatif dalam Pemilu maupun Pilkada kurang optimal karena masih terdapat banyak kerawanan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para kontestan maupun partai politik. Sosialiasi atau penyuluhan sangat penting dilakukan dalam rangka membangun kesadaran ASN, kepala desa beserta perangkatnya agar tidak terlibat dalam politik praktis. Terdapat beberapa ulasan mendasar tentang dukungan potensi pelaksanaan pengabdian ini antara lain :

1. Adanya dukungan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terkait giat penguatan preferensi politik ASN, Kepala desa beserta perangkatnya untuk netral dalam Pemilu
2. Adanya dukungan ASN dalam Kepala Desa serta Camat dalam pelaksanaan pengabdian.
3. Adanya keinginan bagi semua stakeholder termasuk KPU dan Bawaslu dalam mendorong netralitas ASN, Kepala Desa beserta perangkat di Provinsi Gorontalo.

1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya

Secara keseluruhan, netralitas ASN, Kepala Desa dan aparat desa adalah masalah krusial yang terjadi dalam setiap Pemilu. Sebagai kelompok birokrasi di daerah, keberadaan mereka sangat bergantung

pada keberadaan kepala daerah atau atasan dari masing instansi. Birokrasi yang handal, professional dan independensi selalu dipertaruhkan disetiap Pemilu maupun Pilkada. ASN, Kepala Desa dan aparat desa sulit untuk netral karena beberapa pertimbangan diantaranya, kepatuhan dan kesetiaan kepada atasan, motif karir, ikatan kekerabatan dengan calon, serta faktor tim sukses, pasangan calon, atasan serta pengaruh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Kepala Daerah membuat kelompok birokrasi di daerah sulit untuk netral dan memilih untuk memihak kepada calon tertentu. Merujuk pada masalah tersebut maka, metode penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui pelaksanaan pengabdian dengan tema Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) Menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Botupingge dsan Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango”.

1.3 Teknologi/Metode yang Digunakan

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini mencakup :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang berhubungan dengan netralitas birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango.
- b. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi penguatan netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Profil Singkat Kelompok Mitra

Kelempok mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah Bawaslu kabupaten Bone Boilango, Panwascam Kabupaten Botupingge dan Suwawa Selatan beserta pemerintah kecamatan dikedua wilayah dimaksud. Observasi awal dari kelompok mitra dalam memitigasi kerawanan Pemilu khususnya di kabupaten Bopane Bolango mengalami ancaman serius dari segi mobilisasi birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) dalam memenangkan pasangan calon tertentu. Atas kebutuhan tersebut, kelompok mitra dan PT dalam hal ini Jurusan IHK/PPKn sama berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang Netralitas Birokrasi ((ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa)) menjelang Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Bone Bolango yang bertempat di Kecamatan Botupingge dan Kecamatan Suwawa Selatan.

1.5 Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

Kelompok Sasaran	Potensi	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> - ASN yang berdomisili di Kecamatan Botupingge dan Kecamatan Suwawa Selatan - Kepala Desa beserta Perangkat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan kelompok mitra terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi - Terdapat kewenangan yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk lembaga perguruan tinggi dalam memberikan Pendidikan politik termasuk kelompok birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pengetahuan dan peran Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) tentang agenda netralitas politik dalam Pemilu b. Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) Siswa kurang menyadari perannya sebagai kelompok independent dalam Pemilu c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu khususnya netralitas birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa)

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Terdapat beberapa target dalam proses pelaksanaan pengabdian ini, antara lain :

1. Identifikasi masalah menyangkut dengan kerawanan pelanggaran Pemilu yang terjadi disekitar Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa).
2. Membangun kesadaran siswa untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam Pemilu
3. Memberikan Penguatan Netralitas Politik Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) dalam Pemilu
4. Penguatan preferensi politik kepada Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) menjadi pemilih cerdas dan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada Pemilu serentak tahun 2024

Berdasarkan pada target kegiatan tersebut di atas, luaran kegiatan ini mencakup

1. Laporan hasil pengabdian kepada pihak terkait
2. Jurnal Ilmiah
3. HKI

BAB III

METODE PELAKSANAAN

2.1 Persiapan

Adapun yang menjadi tahapan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango
2. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan
3. Persiapan sarana spanduk dan materi penyuluhan/ sosialisasi
4. Pelaksanaan pengabdian
5. Laporan Pengabdian
6. Penebitan Jurnal dan HKI

2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tatap muka siswa SMA Negeri 11 Kabupaten Gorontalo Utara dengan pelaksana program maupun narasumber dalam kegiatan ini adalah :

No	Materi	Narasumber	Tempat
1	Alternatif penguatan Netralitas ASN, Kepala Desa beserta perangkat Desa	Dr. Ramli Mahmud, S.Pd, M.A	Aula Kantor Desa Timbuolo Tengah.
2	Regulasi Teknis Terkait Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sofyan Djama, S.Pd	Aula Kantor Desa Timbuolo Tengah.

2.3 Rencana Keberlanjutan Program

Rencana keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah Bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango bersama lembaga *Ad Hoc* serta pihak Pemerintah Kecamatan untuk melakukan pendampingan secara berkala kepada ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa serta mengaktifkan dan mendorong birokrasi ditingkat kecamatan untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan sosialisasi dan penggunaan media sebagai sarana pengawasan Partisipatif menjelang Pemilu 2023.

2.4 Kelayakan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi tugas pokok bagi Lembaga Perguruan Tinggi, dimana pengabdian masyarakat adalah bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kaitannya dengan hal tersebut, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi. PPKn FIS UNG perlu melakukan kegiatan dimaksud kerana berhubungan dengan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memenuhi tuntutan kurikulum diantaranya adalah mata kuliah Pemilu dan Sistem Kepartaian, Demokrasi dan HAM, Sistem Pemerintahan Daerah serta Sistem Politik Indonesia

BAB IV

JADWAL DAN BIAYA KEGIATAN

4. 1 Anggaran Biaya

Uraian Kegiatan		Vol	Satuan	Harga	Jumlah
1	Honorarium	1	Org	500.000	500.000
2	Bahan Habis Pakai				
	Spanduk	1	Buah	200.000	200.000
	Kertas HVS A4 70 Gram	1	Rim	35.000	35.000
	Konsumsi Berat	30	Org	25.000	750.000
	Konsumsi Ringan	30	Org	10.000	300.000
3	Perjalanan				
	Survei Awal	2	Org	50.000	100.000
	Pelaksanaan Kegiatan	4	Org	50.000	200.000
4	Lain-Lain				
	Penyusunan, Pengandaan dab Penjilidan	3	Eks	15.000	15.000
	Penerbutan Jurnal	1	Jurnal	400.000	400.000
Jumlah					2.500.000

Terbilang :

(Dua Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah)

4.2 Jadwal Kegiatan

1	JENIS KEGIATAN	BULAN					
		Agustus		September		Oktober	
		Minggu		Minggu		Minggu	
		III	IV	I	III	I	II
2	Persiapan						
3	Koordinasi						
3	Penulisan dan Pengajuan Proposal						
4	Pelaksanaan						
5	Laporan						
6	Jurnal						

4.3 Tempat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Aula Desa Timbuolo Tengah Kecamatan Botu Pingge Kabupaten Bone Bolango.

BAB V

HASIL YANG TELAH DICAPAI



Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama (LOA) Fakultas Ilmu Sosial dengan Bawaslu Kabupaten Gorontalo No. 3450/UN47.B2/HK07/2023) dengan Impelmentasi Kerjasama (IA) antara Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (IHK) Prodi. PPKn dengan Bawaslu Kabupaten Gorontalo No.....

Tentang pelaksanaan sosialisasi netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan Aparat Desa menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Kegiatan tersebut mendapat dukungan baik berasal dari Ad Hoc Bawaslu yakni Panwascam Kecamatan maupun stakeholder baik pemerintah kecamatan, Kepala Desa beserta perangkat desa dan para ASN yang berdomisili di Kecamatan Botupingge maupun Kecamatan Suwawa Selatan.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Bone Boalengo Bersama Panwascam telah memetakan potensi pelanggaran ASN disetiap Kecamatan. Atas dasar itulah tim pelaksana pengabdian mengedarkan angket melalui *Google Form* sebelum pelaksanaan sosialisasi untuk memastikan pemahaman Birokrasi terhadap preferensi politik mereka dan pemahaman serta pengetahuannya terhadap larangan dalam Pemilu. Hasil kuesioner awal menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan cenderung tidak netralnya birokrasi dalam Pemilu antara lain pertimbangan ikatan persaudaraan 80 % dan motif karir 92 %, sementara itu terdapat preferensi yang sangat mempengaruhi adalah 95 dipengaruhi oleh kepala daerah (Bupati) yang sebelum masa penetapan sebagai bupati defenitif.

Selain itu, 90 % Birokrasi (ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa) belum mengetahui dengan jelas



bentuk larangan secara teknis dikarenakan regulasi yang sering berubah. Pada Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, DPR RI, DPD RID, DPRD Provinsi Kabupaten dan kota Birokrasi (ASN) diperbolehkan mengikuti kampanye tanpa menggunakan identitas calon atau partai pengusung dan harus pasif, namun pada Pilkada serentak dilarang untuk mengikuti kampanye, sementara aparat desa dapat mengikuti kampanye pada Pilkada namun di Pemilu dilarang.

(perbawaslu). Temuan data awal tersebut beririsan dengan temuan (Edward Aspinall, 2019) bahwa terdapat 80 % penunjukan jabatan senior

adalah hasil dukungan kepada calon selama kampanye Pemilu. 90 % kesetiaan jauh lebih penting dari kapasitas dan profesionalitas birokrasi. 60 % pejabat senior berpartisipasi dalam kampanye pemilu. 50 % ASN senior terlibat dalam kampanye politik di Jawa. Sementara diluar Jawa 100%

Hasil kuesioner awal tersebut sangat membantu pelaksana baik Bawaslu maupun dosen dalam memetakan penguatan atas kelemahan dari masing-masing peserta yang hadir dalam sosialisasi. Terdapat beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai unsur mitigasi krawanan Pemilu serentak yang berhubungan dengan netralitas birokrasi di Kecamatan Botupingge dan Kecamatan Suwawa Selatan, diantara :

1. ASN

Keresehan yang dialami oleh kelompok ASN terhadap stigma yang dibayangi ancaman karir menjadi kendala bagi ASN untuk netral menjelang Pemilu. Para ASN yang berada pada jabatan fungsional seperti tenaga guru dan Kesehatan selalu diintimidasi untuk mendukung calon tertentu. Dialin sisi,



mereka menyadari bahwa netralitas dan independensi sebagai jiwa korps ASN harus dijaga. Posisi atasan dan kepala daerah menjadi pertimbangan utama ASN dalam mendukung pasangan calon. Ketatan dan ketahuan kepada atasan maupun pimpinan

didaerah merupakan sumber utama preferensi politik ASN. Selain itu, motif karir juga sangat mempengaruhi netralitas ASN

2. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Hasil kuesiner awal dan diskusi disaat sosialisasi menunjukkan bawah kepala desa beserta perangkat

desa mengalami kebingungan dalam menjalankan kebijakan di tingkat desa. Disatu sisi kebijakan pemerintah daerah dalam hal menjalankan ini Bupati, disisi yang lain melanggar aturan. Misalnya dalam pemberian bantuan atau kebijakan layanan lainnya yang bersumber dari pemerintah daerah,

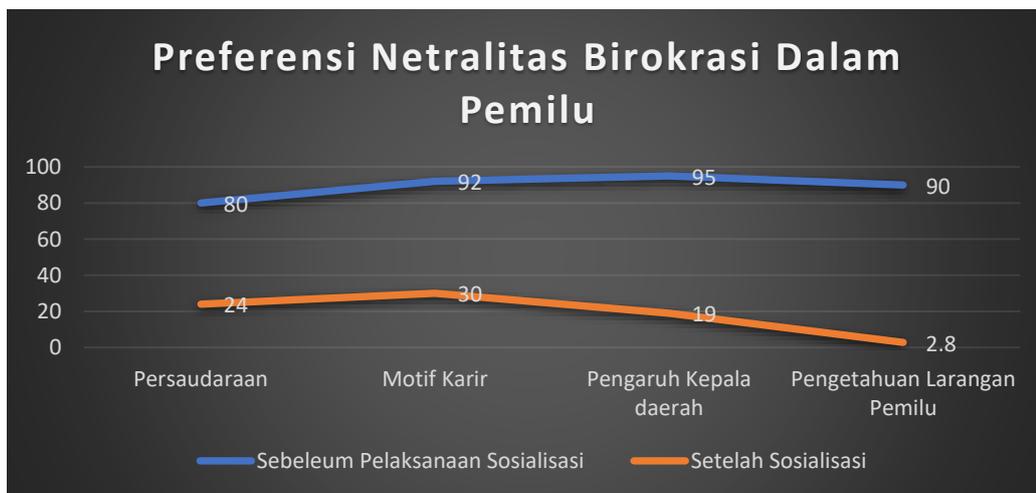


daerah, tentunya yang disampaikan dalam Bahasa tersirat adalah program bupati, namun hal tersebut dianggap merugikan pasangan calon lain. Dalam kondisi demikian, semua kepala desa berharap agar Bawaslu sebagai lembaga pengawasan turut serta dalam pengawalan program pemerintah daerah agar

kepala desa beserta perangkat tidak salah arah. Selain itu kepala desa dan aparatnya selalu menjadi sasaran empuk dari pasangan calon untuk mendulang suara pada saat Pemilu, hal ini dikarenakan kepala desa ada aktor sentral dalam kehidupan Masyarakat dan memiliki wiyalah dan basis yang dapat di mobilisasi.

Berangkat dari temuan data dan masalah yang dialami oleh aparatur birokrasi (ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa) di kedua kecamatan tersebut, narasumber baik dosen maupun bawaslu memberikan pemahaman secara kontekstual mengenai larangan dan Solusi yang harus dilakuakn oleh birokrasi untuk dapat menegakan netralitas dan independensinya. Diskusi/ tukar pikiran diantara kedua belah pihak dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada aparatur birokrasi untuk menegakan hukum Pemilu dan menjaga jiwa korps aparatur sipil negara yang didalamnya terdapat kepala desa beserta perangkat desanya.

Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan efektif dalam memberikan penguatan atas sikap netralitas aparat birokrasi dalam Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari hasil olahan data melalui *google form* setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Data diolah berdasarkan sebaran Google Form tanggal..... September 2024

Temuan hasil olahan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengabdian Kerjasama antara Jurusan IHK



Prodi PPKn dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango efektif dalam penguatan pemahaman aparatur birokrasi dalam hal ini ASN, Kepala Desa dan Aparat Desa dalam menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024. Pertimbangan persaudaraan atau politik kekerabatan yang sebelum sosialisasi

berkisar 80 % menurun drastis 24 % setelah pelaksanaan sosialisasi. Begitu juga sebaliknya motif karirs sebesar 92 % menurun menjadi 30 % pengaruhnya, hal yang sama juga terjadi pada preferensi mereka terhadap pengaruh atasan atau kepala daerah, dari 95 % menjadi 19 % setelah kegiatan sosialisasi. Melalui kegiatan pengabdian juga telah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada aparatur birokrasi atas tingkat kognitif mereka terhadap hukum Pemilu, dimana sebelumnya terdapat 90 % peserta yang mengalami kebingungan atas larangan dalam Pemilu, namun setelah pelaksanaan sosialisasi 2,8 % yang belum memahami.

BAB VI

RENCANA TAHAP SELANJUTNYA

Berdasarkan pada pencapaian dari hasil pengabdian diatas maka rekomendasi untuk rencana tahap selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi berkelanjutan antara pihak Jurusan IHK Prodi PPKn dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango untuk membangun komunikasi yang efektif dengan stakeholder baik camat, kepala desa maupun kelompok ASN yang berdomisili di Kecamatan Botupingge dengan Kecamatan Suwawa Selatan.
- b. rancangan yang akan dilakukan kedepannya yaitu membentuk komunitas salam awas aparatur birokrasi kecamatan melalui grup Whatsaap
- c. hasil pengabdian ini akan dijurnalkan ke jurnal nasional yang bereputasi agar bisa menjadi rujukan bagi setiap orang yang yang melakukan pengabdian tentang netralitas birokrasi dalam Pemilu.

BAB VIII

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Permasalahan mengenai netralitas aparatur birokrasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa) dalam pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara terutama Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Pemilu termasuk mengawasi netralitas birokrasi. Keberadaan *stakeholder* terutama Perguruan Tinggi harus mengambil bagian untuk memitigasi maupun menghadirkan Solusi dalam hal penanganan netralitas birokrasi dalam Pemilu. Melalui metode sosialisasi, hasil pengabdian dianggap efektif karena dapat memberikan penguatan kepada aparatur birokrasi di Kecamatan Botupingge dan Kecamatan Suwawa Selatan untuk netral dalam Pemilu. Diantara beberapa temuan diantaranya motif persaudaraan atau kekerabatan, karir, pengaruh kepala daerah serta pengetahuan aparatur birokrasi mengenai larangan dalam Pemilu telah mendapatkan jalan keluar melalui sesi diskusi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa preferensi politik, tingkat kognitif terhadap larangan aparatur birokrasi setelah pelaksanaan sosialisasi sudah sangat efektif.

5.2 Saran

- a. Kepada pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango untuk melakukan kegiatan secara intensif tentang penguatan netralitas birokrasi kepada seluruh elemen birokrasi termasuk Kepala Desa, ASN tenaga Fungsional Guru dan Kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
- b. Khusus untuk lembaga dalam hal ini adalah Jurusan Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan (IHK) Prodi. PPKn untuk lebih intens dalam melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan Netralitas Birokrasi dalam Pemilu.

5.3 Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango beserta staf dan jajaran, LP2M Universitas Negeri Gorontalo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Pemerintah Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara atas dukungan dalam pelaksanaan Pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidja, I., 2022. Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), pp. 2034-2041.
- Edward, A. & Ward, B., 2019. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: YOI.
- Gehlbach, S. & Simpser, A., 2015. Electoral Manipulation as Bureaucratic Control. *American Journal of Political Science*, pp. 212-224.
- Jeong, G. H., 2016. Electoral Rules and Bureaucratic Effectiveness. *P&P: Politics & Policy*, pp. 1089-1115.
- Kompas, 2021. *Problem Netralitas Bisa Lebih Berat*. Jakarta, Kompas.
- Mahmud, R., Wantu, A., Yunus, R. & Adhani, Y., 2022. Perilaku Rasional Politik Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalmeo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.
- Porter, E. & Rogowski, J. C., 2018. Partisanship, Bureaucratic Responsiveness, and Election Administration: Evidence from a Field Experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, pp. 602-617.
- Sarker, M., Sultana, Y. & Prodhan, A., 2017. Problems and Challenges of Public Administration in Bangladesh: Pathway to Sustainable Development. *International Journal of Public Administration and Policy Research*, pp. 16-25.
- Singh, R., 2019. Coalition Politics in Contemporary India: Development and Dimensions. *Jurnal Studi Pemerintahan*, pp. 19-30.
- Siti, Z. R., 2021. The Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics. *Journal of Business and Entrepreneurship*, pp. 63-76.
- Wahyudi, L., 2018. Politisasi Birokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *Paradigma*, pp. 155-164.

Biodata Ketua Pengusul

CURICULUM VITAE

Nama : DR.DRA.LUCYANE DJAAFAR, SH.MPA
NIP/NIK : 196811062000032001/7571024611680001
NIDN : 0006116804
Tempat & Tanggal Lahir : GORONTALO 6 NOVEMBER 1968
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Status Perkawinan : KAWIN
Agama : ISLAM
Golongan/ Pangkat : IVC/PEMBINA UTAMA MUDA
Jabatan Akademik : LEKTOR KEPALA
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Alamat Perguruan Tinggi : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 6 KELURAHAN WUMIALO
KEC. KOTA TENGAH KOTA GORONTALO
Nomor Telepon : 0435821125
Alamat Rumah : JL. COKROAMINOTO NO.186. RT.001/RW.006
KELURAHAN LIMBA U 1 KECAMATAN KOTASELATAN
KOTA GORONTALO
Nomor Telepon Genggam : 085256062220
Alamat e-mail : lucyane.djaafar.ung.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
1992	Sarjana	Universitas Samratulangi	Ilmu Pemerintahan
2008	Magister	Universitas Gajah Mada	Administrasi Negara
2012	Sarjana	Universitas Gorontalo	Hukum

2016	Doktor	Universitas Negeri makassar	Administrasi Publik
------	--------	--------------------------------	---------------------

PELATIHAN PROFESIONAL/ KEILMUAN/ KEAHLIAN			
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/LuarNegeri)	Penyelenggara/ Penerbit Sertifikat	Jangka Waktu
2012	Mengikuti Sandwich Like Program di Northern Illinois University (NIU) Amerika Serikat Tahun 2012	Northern Illinois University	13 hari
2017	Training of Trainer (TOT) Bagi dosen calon pembimbing PKM	UNG	1 Hari
2017	Strategi dan model pembelajaran poltekes kemenkes Gorontalo	Poltekes Kemenkes Gorontalo	3 Hari
2018	Workshop Penulisan buku ajar yang komprehensif dan berkualitas bagi dosen	STIA Bina Taruna Gorontalo	1 hari
2019	Workshop penulisan jurnal Internasional terindeks scopus	Fakultas Ilmu sosial	2 Hari
2022	Workshop peninjauan kurikulum	Plotekes Kemenkes Gorontalo	3 Hari
2022	Workshop Rekonstruksi perangkat pembelajaran mata kuliah wajib umum (MKDU) PBL dan PJBL berbasis Outcome Based Education (OBE)	LP3M Universitas negeri Gorontalo	2 Hari
2023	Pelatihan Kehumasan	Badan Kerjasama Organisasi Wanita	1 Hari
2023	Pertemuan pemuktahiran dan penyusunan rencana pembelajaran semester	Politeknik Kesehatan Gorontalo	2 Hari
2024	Pelatihan penyusunan bahan ajar mata kuliah wajib (MKMK)	UNG	32 Jam

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
Pengantar ilmu Pemerintahan	PPKn	FIS/PPKn	2020
Kebijakan Publik	PPKn21	FIS/PPKn	2020
Hukum Administrasi Publik	PPKn	FIS/PPKn	2020
Sosiologi Politik	PPKn	FIS/PPKn	2020
Hubungan Internasional	PPKn	FIS/PPKn	2020
Hukum Tata negara	PPKn	FIS/PPKn	2021
Sistim Pemerintahan Daerah	S1PPKn	Pasca sarjana/PPKn	2021
Filsafat dan demokrasi	S2 PPKn	Pasca sarjana/PPKn	2022
Perbandingan Sistim Politik	S2 PPKn	Pasca sarjana/PPKn	2023
Formulasi Kebijakan Publik	S2 Administrasi Publik	Pascasarjana/Adminitrasi Publik	2024
Birokrasi dan Governansi Publik	S3AdministrasiPublik	Pascasarjana/Administrasi Publik	2024
Etika Politik	PPKn	FIS/PPKn	2024
Metodologi Penelitian	PPKn	FIS/PPKn	2024

KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2018	Reformasi Pelayanan Publik (studi kasus pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo	UMIGO
2019	Journal The effect of workdiscipline, work motivation and leadership on employee performanat PT Devrindo widya karawang In Indonesia	Blue Eyes intelligence Engineering & sciences publication
2019	Kualitas layanan publik di Kantor Investasi Layanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan TK) di Kabupaten Bone Bolango	UMIGO
2021	Kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango	JSEH Jurnal social dan humaniora Volume 7 nomor 2 Desember 2021
2022	Penguatan tata Kelola bumdes berbasis karakter masyarakat desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Jurnal Adidas Volume.3 Nomor 2 tahun 2022
2022	The role of government in the managemen of tourism object developmrnt of kurenai beach bobubarani village, Kabila Bonebolango regency	Internation Journal on Social science, economics and art Vol12 Nomor 2 2022
2022	Tinjauan hukum pidana dalam penerapan pasal 359 KUHP pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh hakim pengadilan negeri Gorontalo	Jambora Journal civic education 2022 Volume 2 nomor 1 Mei 2022
2022	Socialization of multiculturalism (Strengthening understanding of the concept of multiculturalism in students of SMPTN 1 Botupingge Bone Bolango Regency)	Asian Journal of Community Services (AJCS) Vol.No.4 2022:189-198

2022	Peran dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani pengemis di Kota Gorontalo	Jurnal ideaspublishing.co.id volume 8 Nomor 4 November 2022
2023	Legal Procection of women and children vitims of sexual violence in Gorontalo city police	Legal Brief Volume 12 No 1 (2023) ISSN 1979-522X Published by IHSA Institute
2023	The Preformance of the village head in the village government based on lawno 6 of 2014 (study on Mananggu Village Boalemo Regency)	West Scence interdisciplinary studies Vol 1 Nomor 1 January 2023 E ISSN 2985-8895
2023	The assessment of Indonesia's religious courts in resolving shari'ah banking disputes according to the principles of justice	Manchester Journal of transnational Islamic law dan Practice vo.19 issue3 2023
2024	Restoration of court service as a configuration for legal development with legal certainty, justice and benefits	Multidisciplinary
2024	Public Administration Analysis of Bleaching Motorized Vehicle Tax in Gorontalo Province	International Journal of Religion ISSN: 2633-352X (Print) ISSN: 2633-3538 (Online)

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/Pembicara
2016	Internasional Conference on education and teacher Development	Universitas Makassar	Peserta
2017	Seminar dan kemah konstitusi dalam rangka peningkatan konstitusi khususnya Hak Konstitusional warga negara bagi siswa SMA/MA/ sederajat se Sulawesi	Mahkamah Konstitusi	Peserta
2018	Lokakarya kurikulum program studi S1 PPKn	Fakultas Ilmu Sosial	Peserta

2018	Coching mahasiswa PKL program studi PPKn	Fakultas Ilmu Sosial	Pembicara
2021	Seminar digital literacy in formal online education	Universitas Negeri Gorontalo	Peserta
2022	Webinar Nasional strategi pembangunan daerah	Universitas Negeri Gorontalo	Peserta
2023	Seminar Nasional Pajak untuk Lembaga Sosial	Universitas Gorontalo	Peserta

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020	Partisipasi pemuda dalam pembangunan desa di desa Kaliyoso Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo	Anggota	Mandiri	Jurnal
2021	Penguatantata Kelola Bumdes berbasis karakter masyarakat desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaangomondow Selatan	Anggota	Mandiri	Laporan
2023	Sosialisasi penanaman nilai agama terhadap perilaku remaja di desa Toloti'o Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango	Ketua	Mandiri	Jurnal
2023	Sosialisasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah kenakalan remaja di SMP Negeri 3 Limboto Kabupaten Gorontalo	Ketua	BNBP	Laporan
2024	Penguatan pengawas partisipasi siswa SMA 11 Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo menjelang pemilu 2024	Ketua	Mandiri	Laporan

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2010	Sertifikasi Dosen tanggal 5 Juli 2010	Kementrian Pendidikan Nasional RI
2013	Satyalencana Karya Satya X Tahun, Tahun 2013	Presiden RI

2016	Sosialisasi pemahaman konstitusi warga negara bagi dosen Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan wilayah Sulawesi selatan	Mahkamah Konstitusi
2020	Satyalancana Karya Satya XX tahun 2020	Presiden
2021	Latihan dasar kepemimpinan baru 2021 membentuk karakter yang intelektual, disiplin dan berjiwa social yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	HMJ UNG

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/ Jenjang
2020- skrng	Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang UNG	Bendahara
2020-skrng	Pengurus AP3KNI Wilayah Propinsi Gorontalo	Pengurus
2021	Bhayangkari Cabang Limboto Polda Gorontalo	Wakil Ketua
2022	Bhayangkari Cabang SPN Polda Gorontalo	Wakil Ketua
2022-sekarang	Organisasi Islam Propinsi Gorontalo	Anggota

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Gorontalo, 23 September 2024

Hormat Saya



DR. DRA. LUCYANE DJAAFAR, SH. MPA

